



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 17 JUNI 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO

KOMISI A KRITISI CAPAIAN 100 HARI KINERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO PERLU DITINGKATKAN

Sidoarjo, 17 Juni 2025. Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mengkritisi capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo selama 100 hari pertama menjabat. Ketua Komisi A, H. Rizki Abi Fauzi, mengatakan bahwa meskipun banyak program yang telah diwujudkan, namun secara keseluruhan, capaian kinerja yang ditargetkan belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu aspek yang dikritisi adalah pelayanan publik, khususnya proses administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan. Rizki Abi Fauzi berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas SDM petugas pengelola pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan.

Langkah ini bertujuan agar pelayanan Adminduk berjalan lebih optimal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Sidoarjo.

Upaya terbaru dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran Adminduk. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai lokasi strategis, termasuk di lingkungan sekolah-sekolah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO

Komisi A Dukung Digitalisasi Layanan Dinas Kominfo

Sidoarjo, 17 Juni 2025. Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mendukung digitalisasi layanan dinas Kominfo. Ketua Komisi A, H. Rizki Abi Fauzi, mengatakan bahwa digitalisasi layanan akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu program yang didukung adalah sosialisasi aplikasi pendaftaran media tahun anggaran 2025 yang digelar Dinas Kominfo Sidoarjo dan dihadiri Komisi A DPRD Sidoarjo. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran media dan cara menggunakan aplikasi tersebut.

Rizki Abi Fauzi berharap dengan adanya digitalisasi layanan, proses pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.



Genjot Layanan Adminduk secara Maksimal

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas pengelola pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan.

Langkah ini bertujuan agar pelayanan Adminduk berjalan lebih optimal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Sidoarjo.

Upaya terbaru dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran Adminduk. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai lokasi strategis, termasuk di lingkungan sekolah-sekolah.



Bupati Subandi Andil Meriahkan Scooter Riding di Lanudal Juanda

Sidoarjo, 17 Juni 2025. Bupati Sidoarjo, H. Subandi bersama istri, Ny. Sri Wahyuni, ikut andil meriahkan acara Scooter Riding di Lanudal Juanda, Minggu (15/6/2025).

Subandi dan istri, bersama rombongan pengantar tamu dari berbagai komunitas di Sidoarjo dan Surabaya, melakukan touring keliling dalam acara rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Penerbangan Angkatan Laut tersebut.

Rute yang dilalui peserta cukup menarik dan strategis, meliputi Bunderan Aloha, Puri Surya Jaya, Kalang Anyar, hingga finish di Shelter Skadron Udara 800. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memiliki nilai sosial yang tinggi.

Dalam perjalanan touring, panitia menyampaikan apresiasi dan dukungan dari pemerintah pusat terhadap semangat kebersamaan dalam perayaan HUT kali ini.

"Selamat HUT ke-69 Penerbangan Angkatan Laut. Semoga semakin sukses dan sejahtera," kata Subandi di sela kegiatan.

Subandi menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan yang tidak hanya bertujuan menjaga soliditas pertahanan dan masyarakat, tapi juga memiliki nilai edukasi, kebersamaan, serta kepedulian sosial. (Khol/Ben)

Calon Siswa SMP yang Tinggal Satu RT dengan Sekolah Jadi Prioritas

SPMB Jalur Domisili Diprioritaskan bagi Tiga Kategori

SIDOARJO. Sistem Penempatan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP jalur domisili akan diutamakan dengan tiga pembaruan zona prioritas. Berbeda dengan jalur zonasi yang mengutamakan jarak, jalur domisili mengutamakan kedekatan lingkungan RT hingga desa calon murid dengan sekolah.

Kepala Bidang Mutu Pendidikan Pendidikan Negeri (SPMB) Kabupaten Sidoarjo, Netti Lastingsih menjelaskan, zona prioritas pertama diprioritaskan bagi siswa yang berdomisili di RT yang sama dengan sekolah. "Jadi siswa yang rumahnya berada dalam satu RT atau langsung berbatasan dengan RT wilayah sekolah yang dituju, masuk dalam prioritas pertama, punya peluang besar untuk diterima," katanya.

Zona kedua meliputi siswa yang tinggal di RT sekitar dari sekolah yang dipilih. Bisa berjarak dua RT lebih dari sekolah tujuan, hingga lingkup antar RW. Kemudian, zona ketiga mencakup wilayah kelurahan atau desa yang sama atau berdekatan dengan lokasi sekolah.

"Calon siswa yang tidak

Calon siswa yang rumahnya berada dalam satu RT atau langsung berbatasan dengan RT wilayah sekolah yang dituju, masuk dalam prioritas pertama, punya peluang besar untuk diterima."

Netti Lastingsih Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dikbud Sidoarjo

"Nama orang tua atau wali murid dalam KK harus sesuai dengan nama, maka penentuan dilakukan secara berurutan berdasarkan zona prioritas, kemudian usia calon siswa dimulai dari yang tertua, urutan pertama sekolah, serta waktu pendaftaran.

Netti mengatakan, persyaratan lainnya, yaitu calon murid harus memiliki kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

Terkendala Lahan, Pembangunan Sekolah Rakyat Masih Tertunda

KOTA-Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait penyediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Bashori Ali, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan syarat lahan minimal seluas lima hektare.

"Lahan tersebut harus merupakan aset milik daerah dan tidak boleh berada di zona hijau atau kawasan konservasi," jelasnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Senin (16/6).

Selain itu, lahan juga harus memiliki bukti kepemilikan sah dalam bentuk surat aset dan harus

Progres Pembangunan Sekolah Rakyat

Anggaran Pusat	Rp 210 miliar
Lokasi Pembangunan	1. Desa Kajeksan, Tulangan (Dikelola Dinsos) 2. Desa Wedi, Gedangan (Dikelola Unesa)
Status di Kajeksan	Lahan tersedia 4,3 Ha dari syarat 5 Ha Kekurangan 0,7 Ha masih proses pembelian dan balik nama aset daerah
Syarat Lahan dari Pemerintah Pusat	- Minimal 5 hektare - Aset milik daerah - Bukan zona hijau atau konservasi - Bukti surat aset lengkap - Diserahkan ke pemerintah pusat
Calon Siswa	Kelompok kurang mampu berdasarkan data DT-SEN (gabungan DTKS, RSS, dan data kemiskinan ekstrem)
Perkiraan Waktu Pembangunan	Pembangunan fisik kemungkinan dimulai tahun 2026 setelah seluruh syarat administrasi terpenuhi

Bashori Ali



Komisi A Dukung Digitalisasi Layanan Dinas Kominfo

Sidoarjo, Memorandum Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung hadirnya pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk media, untuk memudahkan pemesanan iklan sebagai promosi terhadap digitalisasi layanan publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo.

Ketua Komisi A H Rizza Ali Faizin, sangat mendukung hadirnya *e-catalog* versi 6 atau *inaproc* dalam memasarkan produk iklan. Karena melalui *inaproc*, media cetak atau elektronik dapat mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dengan terbukanya pasar barang/jasa pemerintah akan mempermudah promosi media juga membantu mempromosikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo ke nasional atau internasional. "Sudah seharusnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat diterapkan pada media cetak atau elektronik untuk mempromosikan Sidoarjo yang lebih baik," katanya, Senin (16/6).

"Kami sangat mendukung langkah ini. Kehadiran aplikasi pendataan media diharapkan



Sosialisasi PBJ untuk media dan launching aplikasi pendataan media tahun anggaran 2025 yang digelar Dinas Kominfo Sidoarjo dan dihadiri Komisi A DPRD Sidoarjo.

bisa menjadi pusat data yang terbuka dan terpercaya, serta membantu semua pihak memahami alur kerja sama secara menyeluruh," ucapnya.

Ditambahkan, kegiatan sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, agar penerapan sistem digital benar-benar memberikan dampak maksimal dalam tata kelola informasi pemerintahan.

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Media dan Launching Aplikasi Pendataan Media di Kabupaten Sidoarjo TA 2025 digelar di ruang Delta Graha Lantai 3 Sekretariat DPRD Sidoarjo pada Rabu 11 Juni 2025. Dalam acara ini disampaikan peran media untuk berkembang dalam

menyampaikan informasi secara cepat dan akurat ke masyarakat. Menurut Rizza, wartawan menjadi profesi yang sangat dibutuhkan masyarakat. "Kita bicara di atas podium belum selesai bicara, bentuk sudah ditulis dan tersebar ke mana-mana," respons Rizza menyebut kecepatan yang ditampilkan media.

Sinergitas wartawan dan DPRD perlu ditingkatkan. Dengan harapan kerja-kerja wakil rakyat di bidang legislasi, *budgeting* dan pengawasan dapat diketahui masyarakat. "Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya digitalisasi layanan publik yang diselenggarakan dinas-kominfo," umbulnya.

Ia bahkan berharap, aplikasi

ini menjadi pusat data yang terbuka dan terpercaya. Terutama untuk akuntabilitas publik. "Sosialisasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi pemahaman antara pemerintah dan media, agar bisa memberikan dampak nyata dalam tata kelola informasi pemerintah," terangnya.

Anggota Komisi A Lok Suciati menambahkan, sebagai wakil rakyat butuh media untuk menyampaikan pikirannya dan meminta wartawan menulis secara proporsional, dengan mendahulukan fakta dan data. Kalau wartawan menulis semuanya, tentu ini tidak baik bagi pembacanya.

Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Noer Roch-

mawati, menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam pengadaan layanan publikasi media sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, karena mekanisme konvensional dalam sistem pengadaan pemerintah dinilai sudah tidak relevan lagi dan perlu bertransformasi ke sistem digital yang lebih modern.

"Digitalisasi bukan sekadar tuntutan zaman, tapi juga langkah strategis menuju pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, terutama dalam komitmen pemerintah dengan media," ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya ingin memastikan seluruh insan media memahami prosedur baru untuk pen-

gadaan jasa publikasi yang kini terintegrasi secara digital. Dengan sistem ini, tahapan mulai dari penawaran, kontrak kerja, hingga pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, terbit, dan sesuai aturan. Aplikasi pendataan media yang telah dikembangkan Diskominfo dan Aplikasi tersebut dirancang sebagai alat bantu utama dalam pengelolaan data media, sekaligus mendukung terbit administrasi dan verifikasi yang sah," jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya ingin memastikan bahwa proses kerja sama ke depan berjalan lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik. "Maka kami minta media untuk mengisi data secara lengkap dalam aplikasi ini, agar

tidak perlu lagi pengumpulan dokumen secara manual," urainya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Warih Andono SH. Politisi senior Partai Golkar yang tinggal di Kecamatan Waru itu mengungkapkan, dewan mendukung hadirnya *e-catalog* versi 6 atau *inaproc*. Melalui *inaproc*, media cetak atau elektronik bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. "Sudah seharusnya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dapat diterapkan pada media cetak atau elektronik untuk mempromosikan Sidoarjo," papar H Warih Andono (*adv/kr/san/epe*)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO



KOMISI A KRITISI CAPAIAN 100 HARI KINERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO PERLU DITINGKATKAN



H. RIZZA ALI FAIZIN, M.Pd.I.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo

Sidoarjo - Pojok Kiri, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Reza Ali Faizin, MPdI, mengkritik kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo selama 100 hari ini perlu ditingkatkan karena menurutnya dari 14 program prioritas Bupati - Wakil masih banyak yang belum direalisasikan ke masyarakat secara totalitas, contoh masalah jalan yang masih banyak berlubang dan dikeluhkan masyarakat, sekolah yang juga masih banyak dijumpai perlu rehab serta infrastruktur lainnya yang juga perlu ditingkatkan meskipun dalam catatan legislator PKB yang berangkat dari Anshor serta



komandan Banser ini menilai keberhasilan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dalam 100 hari sudah banyak perubahan pembangunan namun tetap harus ditingkatkan, Ucap Reza pada wartawan via WhatsApp, Kamis, 12/6/25. Sedangkan Legislator PKB Hj Elok Suciati, SH anggota Komisi A DPRD Kabupaten

Sidoarjo yang baru duduk di kursi empuk DPRD Sidoarjo, ia menyoroti kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo selama 100 hari ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidoarjo mengingat masih banyak masyarakat yang mengadu sosial infrastruktur yang belum diperbaiki, Kata Elok legislator yang sebelumnya jadi Kades Sidokepong Sidoarjo pada wartawan, Kamis, 12/6/25. Sementara H Rizal Faudy, SE legislator dari PAN juga mengkritisi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo selama 100 hari ini belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentang pembangunan jalan, sekolah, RTLH dan infrastruktur lainnya masih minim sekali yang dibangun. Meskipun begitu dia juga memuja kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo selama 100 hari kerja ini sudah ada perubahan pembangunan namun belum maksimal, Katanya pada wartawan melalui via WhatsApp, Kamis 12/6/25. Sedangkan berbagai



capaian kinerja berhasil dilakukan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam 100 hari kepemimpinannya. Beberapa capaian penting dalam 14 Program Prioritas telah direalisasikannya secara bertahap. Seperti menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru, berobat gratis, makan bergizi gratis, 20 ribu beasiswa, 20 ribu UMKM naik kelas, bantuan permodalan bagi UMKM, insentif kesejahteraan bagi kader kesehatan maupun bantuan 2 ribu pupuk dan benih kepada para petani dan nelayan. Capaian penting 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo juga terlihat pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Sidoarjo. Meski begitu pasangan Subandi - Mimik menyatakan tidak boleh berpuas diri dengan capaian kinerja di



Drs. H. SAIFUDDIN AFEENDI
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo

100 hari tersebut. Evaluasi akan terus dilakukan untuk menyelesaikan 14 Program Prioritas dalam lima tahun kedepan, Tambah legislator gaek yang pernah juga gagal duduk kursi DPRD periode sebelumnya. Sedangkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Drs H. Saifuddin Afandi, MPd politisi asal Taman yang dari Partai PKB, ia lebih vulgar mengkritisi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo selama 100 hari kerja ini belum terasa dampak pembangunan bagi masyarakat, mengingat Bupati dan Wakil Bupati selama 100 hari kinerja nya ini masih terpaku pada koordinasi pada internal ASN/ OPD- OPD, Katanya pada wartawan via WhatsApp Senin 16/6/25. Sedangkan Subandi - Mimik ingin mengetahui langsung sejauh mana 14 program prioritas telah dijalankan instansinya dalam 100 hari menahkodai Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati Mimik Idayana yang hadir mewakili Bupati Subandi meminta seluruh jajaran OPD bekerja keras mewujudkan 14 program prioritas tersebut. Ia meminta kepala OPD tidak hanya duduk-duduk saja dikursi kerjanya. Namun turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Menurutnya kemajuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bergantung dari bupati dan wakil bupati saja. Namun juga tergantung pada seluruh OPD Sidoarjo yang ada. "Ayo semangat bekerja untuk membangun Sidoarjo, ojek lungguh nang kursi tok, saya mohon ayo mudun, kalau kita tidak turun, kita tidak akan paham seperti apa dibawah itu," ucapnya. (Khol/ADV)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PELAYANAN

- Wabup Sidoarjo Mimik Idayana saat menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kapasitas Pengelola Pelayanan Adminduk 2025 yang digelar di aula kantor BKD Sidoarjo, Senin (16/6).



SURYA / M. TAUFIK

Pelayanan di Kecamatan dan Desa Perlu Perbaiki

SIDOARJO, SURYA - Pelayanan di kantor kecamatan dan desa atau kelurahan di Kabupaten Sidoarjo perlu perbaikan. Masih banyak keluhan masyarakat, utamanya dalam layanan administrasi kependudukan.

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana mengaku mendapat keluhan langsung dari masyarakat. Keluhan tentang pelayanan oleh petugas layanan di kecamatan dan desa, terkait layanan kependudukan.

Hal itu diungkapkan Wabup Mimik saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kapasitas Pengelola Pelayanan Adminduk 2025 yang digelar di aula kantor BKD Sidoarjo, Senin (16/6).

Mimik berharap, keluhan atau aduan seperti itu tidak ada lagi. Makanya, petugas pelayanan harus benar-benar memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

"Jika sedang ada kendala, tolong sampaikan dengan baik kepada warga. Misalnya

ketika terjadi kekosongan blanko, jaringan bermasalah, atau sebagainya," ujar Wabup Mimik.

Jika ada kekosongan blanko, ia berharap ada sosialisasi kepada masyarakat. Supaya warga tidak kecewa ketika sedang membutuhkan administrasi kependudukan.

"Kasih senyuman, sampaikan permohonan maaf jika blanko lagi kosong. Sampaikan bahwa akan dikasih surat atau ditelpon kalau blanko sudah datang. Supaya masyarakat nyaman," lanjutnya.

Bimtek itu sendiri sengaja digelar oleh Pemkab Sidoarjo melalui Dispenduk Capil untuk meningkatkan SDM petugas pengelola pelayanan Adminduk (administrasi kependudukan) di seluruh kecamatan, serta seluruh desa dan kelurahan.

Tujuannya, supaya pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo berjalan baik. Serta maksimal dalam

memberikan pelayanan.

Wakil Bupati Mimik Idayana berharap lewat Bimtek tersebut integritas dan profesionalisme para petugas pelayanan akan meningkat. Ia meminta petugas pengelola pelayanan Adminduk dapat melayani masyarakat dengan baik.

Wabup berpesan, pelayanan ramah dengan senyum harus dihadirkan. Jangan sampai menampakkan wajah sinis saat melayani masyarakat. Apalagi mempersulit warga yang ingin mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Mimik juga menyebut dirinya akan terus keliling melakukan pengawasan. Ia akan mengecek langsung pelayanan petugas Adminduk di kecamatan maupun di desa dan kelurahan.

"Saya nanti akan turun, saya akan pakai masker dan kacamata biar tidak tahu petugasnya. Supaya saya bisa cek langsung kondisi pelayanan yang dilakukan," ujarnya. (ufi)



Bupati Subandi Andil Meriahkan Scooter Riding di Lanudal Juanda

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Bupati Sidoarjo, H. Subandi bersama istri, Ny Sriatun Subandi ikut andil memeriahkan acara Scooter Riding di Lanudal Juanda, Minggu (15/6/2025).

Subandi dan istri, bersama ratusan pengendara skuter dari berbagai komunitas di Sidoarjo dan Surabaya,

melakukan touring keliling dalam acara rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Penerbangan Angkatan Laut tersebut.

Rute yang dilalui peserta cukup menarik dan strategis, meliputi Bunderan Aloha, Puri Surya Jaya, Kalang Anyar, hingga finish di Shelter Skuadron Udara 800. Selain

menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memiliki nilai sosial yang tinggi.

Dalam perjalanan touring, panitia menyempatkan diri untuk melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 100 bingkisan sembako dibagikan secara simbolis di Gedung

Pemasaran Puri Surya Jaya.

Aksi sosial ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar dan menjadi bagian tak terpisahkan dari semangat kebersamaan dalam perayaan HUT kali ini.

“Selamat HUT ke-69 Penerbangan Angkatan Laut. Semoga semakin sukses dan

jaya selalu,” kata Subandi di sela kegiatan.

Subandi menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan yang tidak hanya bertujuan menjaga soliditas antar lembaga dan masyarakat, tapi juga memiliki nilai edukasi, kebersamaan, serta kepedulian sosial. **(Khol/Ben)**

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Calon Siswa SMP yang Tinggal Satu RT dengan Sekolah Jadi Prioritas

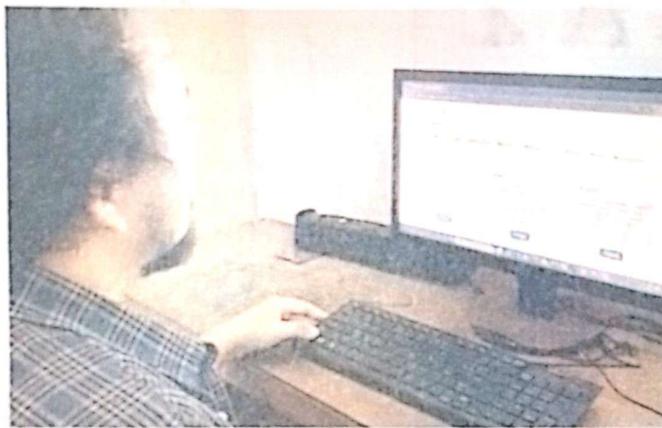
SPMB Jalur Domisili Diprioritaskan bagi Tiga Kategori

SIDOARJO - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP jalur domisili akan diatur dengan tiga pembagian zona prioritas. Berbeda dengan jalur zonasi yang menghitung jarak, jalur domisili mengedepankan kedekatan lingkup RT hingga desa calon murid dengan sekolah.

Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dikbud Sidoarjo Neti Lastiningsih menjelaskan, zona prioritas pertama diperuntukkan bagi siswa yang berdomisili di RT yang sama dengan sekolah. "Jadi siswa yang rumahnya berada dalam satu RT atau langsung berbatasan dengan RT wilayah sekolah yang dituju, masuk dalam prioritas pertama, punya peluang besar untuk diterima," katanya kemarin (16/6).

Zona kedua meliputi siswa yang tinggal di RT sekitar dari sekolah yang dipilih. Bisa berjarak dua RT lebih dari sekolah tujuan, hingga lingkup antar RW. Kemudian, zona ketiga mencakup wilayah kelurahan atau desa yang sama atau berdekatan dengan lokasi sekolah.

"Calon siswa yang tidak



CARI INFORMASI: Ahmad Fariz, warga Sepanjang, Taman, membaca persyaratan pendaftaran SPMB SMP jalur domisili untuk anaknya kemarin (16/6).

TIGA ZONA PRIORITAS SPMB SMP JALUR DOMISILI

ZONA PRIORITAS PERTAMA

Calon murid yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi satuan pendidikan atau yang berbatasan langsung

ZONA PRIORITAS KEDUA

Calon murid yang berdomisili pada rukun tetangga sekitar satuan pendidikan, berjarak beberapa RT atau RW

ZONA PRIORITAS KETIGA

Calon murid yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan/desa lokasi satuan pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo

satu RT dengan sekolah tapi masih dalam desa atau kelurahan yang sama masih ada peluang di zona ketiga," ujarnya. Menurutnya, pemetaan zona prioritas ini telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Dinas dengan pertimbangan dari Permendikdasmen.

Proses seleksi melalui jalur domisili dilakukan berdasarkan skor jarak domisili antara rumah dan sekolah. Jika terda-

pat skor domisili atau kedekatan yang sama, maka penentuan dilakukan secara berurutan berdasarkan zona prioritas, kemudian usia calon siswa dimulai dari yang tertua, urutan pilihan sekolah, serta waktu pendaftaran.

Netti mengatakan, persyaratan lainnya, yaitu calon murid harus memiliki kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.



Calon siswa yang rumahnya berada dalam satu RT atau langsung berbatasan dengan RT wilayah sekolah yang dituju, masuk dalam prioritas pertama, punya peluang besar untuk diterima."

NETTI LASTININGSIH
Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dikbud Sidoarjo

"Nama orang tua atau wali murid dalam KK harus sesuai dengan ijazah sebelumnya, ini untuk meminimalisir kecurangan data kependudukan kami juga bekerjasama dengan Dikdukcapil Sidoarjo," paparnya.

Netti menambahkan, selain SMP Negeri, ada tujuh SMP swasta yang ikut dalam SPMB jalur domisili dan bisa dipilih. "SPMB SMP jalur domisili dibuka Kamis (19/6) sampai Sabtu (21/6). Siswa bisa memilih dua sekolah," ungkapnya. (eza/uzi)

Jawa Pos

PPDB SMP, Dispendikbud Perketat Sistem Zonasi

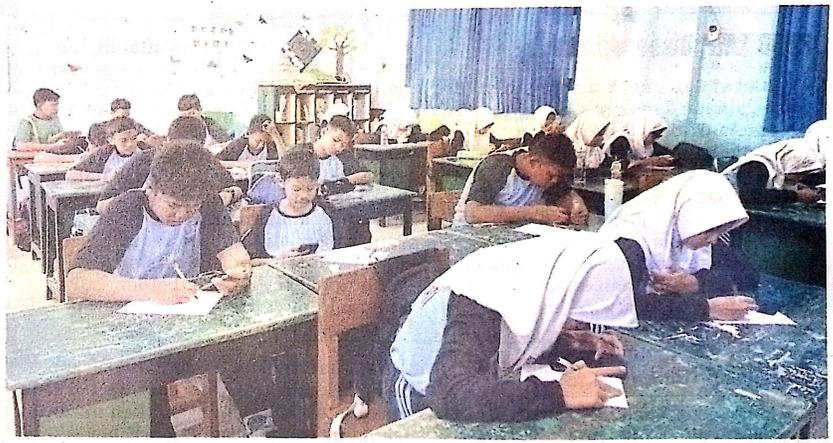
KOTA-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo memperketat penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP tahun ini. Jalur domisili dibagi menjadi tiga zona prioritas berdasarkan jarak rumah calon siswa ke sekolah.

Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dispendikbud Sidoarjo, Netti Lastingsih, menjelaskan ba-

hwa zona pertama mencakup siswa yang tinggal dalam satu RT atau berbatasan langsung dengan RT tempat sekolah berada. Zona kedua meliputi RT sekitar, berdasarkan hasil pemetaan resmi.

"Sementara zona ketiga mencakup wilayah kelurahan atau desa yang berdekatan dengan sekolah. Tujuannya agar anak-anak mendapat sekolah

● Ke Halaman 10



PRIORITAS: Siswa SMPN 1 Sedati saat belajar.

Terkendala Lahan, Pembangunan Sekolah Rakyat Masih Tertunda

KOTA-Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait penyediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Bashori Alwi, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan syarat lahan minimal seluas lima hektare.

"Lahan tersebut harus merupakan aset milik daerah dan tidak boleh berada di zona hijau atau kawasan konservasi," jelasnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Senin (16/6).

Selain itu, lahan juga harus memiliki bukti kepemilikan sah dalam bentuk surat aset dan harus

● Ke Halaman 10



Bashori Alwi

Progres Pembangunan Sekolah Rakyat

Anggaran Pusat	Rp 210 miliar
Lokasi Pembangunan	1. Desa Kajeksan, Tulangan (Dikelola Dinsos) 2. Desa Wedi, Gedangan (Dikelola Unesa)
Status di Kajeksan	Lahan tersedia 4,3 Ha dari syarat 5 Ha Kekurangan 0,7 Ha masih proses pembelian dan balik nama aset daerah - Minimal 5 hektare - Aset milik daerah
Syarat Lahan dari Pemerintah Pusat	- Bukan zona hijau atau konservasi - Bukti surat aset lengkap - Diserahkan ke pemerintah pusat
Calon Siswa	Kelompok kurang mampu berdasarkan data DT-SEN (gabungan DTKS, RSS, dan data kemiskinan ekstrem)
Perkiraan Waktu Pembangunan	Pembangunan fisik kemungkinan dimulai tahun 2026 setelah seluruh syarat administratif terpenuhi



GRAFIS WILLDHAW RADAR SURABAYA



Terkendala Lahan,...

diserahkan ke pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen daerah.

Bashori mengungkapkan, proses pengadaan lahan tidaklah mudah. Salah satu kendala ditemukan di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, yang hanya memiliki lahan seluas 4,3 hektare. "Idealnya kekurangan 0,7 hektare harus segera dipenuhi. Namun, proses pembelian lahan tambahan cukup panjang karena harus melalui tahapan balik nama ke aset daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan baru dapat dimulai jika lahan sudah memenuhi syarat luas dan legalitas. "Prosesnya tidak bisa selesai dalam waktu enam bulan. Jika semua syarat terpenuhi, pembangunan fisik kemungkinan baru bisa dimulai tahun depan," imbuhnya.

Sekolah Rakyat merupakan program pusat yang akan dibangun dengan anggaran sekitar Rp 210 miliar. Fasilitas yang disediakan meliputi jenjang pendidikan dari dasar hingga atas, asrama, tempat ibadah, dan la-

pangan olahraga.

Dinsos Sidoarjo telah menetapkan dua lokasi pembangunan, yakni di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, dan Desa Wedi, Kecamatan Gedangan. Namun, dari dua lokasi tersebut, baru pembangunan di Gedangan yang progresnya ditangani langsung oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sementara itu, Dinsos masih memfokuskan penyelesaian lahan di Tulangan.

Calon siswa yang akan menempati

Sekolah Rakyat diprioritaskan dari kelompok masyarakat kurang mampu. Data siswa berasal dari Data Terpadu Satu Sensus Nasional (DT-SEN), yang merupakan hasil kompilasi dari DT-KS, RSS, dan data kemiskinan ekstrem. Pendataan dan validasi dilakukan pada Maret dan April oleh tenaga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kelompok yang berhak masuk adalah desil satu dan dua, yaitu golongan termiskin berdasarkan klasifikasi Ba-

dan Pusat Statistik," terang Bashori. Meski demikian, hingga kini belum ada data final jumlah calon siswa dari Sidoarjo. "Masih dalam proses, kami belum sampai tahap rekapitulasi," tambahnya.

Ia menegaskan, kesiapan sarana dan prasarana baru bisa dimulai jika semua persyaratan administratif terpenuhi. "Untuk jadwal kegiatan Sekolah Rakyat sendiri, kami belum bisa menentukan," pungkasnya. (sai/vga)



Canal | Luaran Adminduk

dan profesionalisasi sistem...

...



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wakil Bupati Ajak Lansia Partisipasi Aktif Turunkan Angka Stunting

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, mengajak para warga lanjut usia (lansia) untuk ikut ambil bagian dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan sosialisasi peningkatan ekonomi keluarga terhadap penurunan angka stunting yang dihadiri para lansia dari tiga kecamatan, yakni Sedati, Waru, dan Gedangan di Hotel Halogen ByPass Juanda pada Minggu (15/6/2025).

Mimik menegaskan bahwa peran serta lansia dalam keluarga sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi generasi muda dalam hal pemenuhan gizi, pola asuh anak, serta kebersihan lingkungan.

“Lansia adalah aset keluarga yang masih sangat berperan. Dengan pengalaman hidup yang dimiliki, para lansia bisa memberikan contoh dan nasihat kepada anak cucunya agar lebih peduli terhadap kesehatan anak, termasuk pemenuhan gizi yang baik agar terhindar dari stunting,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi semangat para lansia yang hadir dan berharap dapat menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing.

Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penuh program-program pemerintah lainnya, seperti renovasi rumah warga tidak mampu, pembangunan jalan yang berlubang, hingga upaya menciptakan generasi Sidoarjo yang sehat dan cerdas.

“Komitmen Subandi-Mimik adalah maju bersama untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan yang ada di Sidoarjo harus maksimal. Nantinya tidak ada lagi jalan berlubang, tidak ada anak yang tidak sekolah,” tegasnya.

“Jadi, mohon kerjasamanya kalau ada tetangga kanan kiri yang tidak bisa sekolah, rumahnya tidak layak monggo langsung ke saya nanti akan segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan angka stunting diantaranya melalui sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan kelompok lansia sebagai agen perubahan. (Khol/Dy)

Ajak Lansia Jadi Penggerak Penurunan Stunting

Wabup Sidoarjo

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, mengajak para warga lanjut usia (lansia) untuk ikut berperan aktif dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan sosialisasi peningkatan ekonomi keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting. Kegiatan ini diikuti para lansia dari tiga kecamatan, yakni Sedati, Waru, dan Gedangan, yang digelar di Hotel Halogen ByPass Juanda, Minggu sore, (15/6/25).

Mimik menegaskan, peran lansia dalam keluarga sangat penting, terutama dalam memberikan edu-

kasi dan pendampingan kepada generasi muda terkait pemenuhan gizi, pola asuh anak, serta kebersihan lingkungan.

"Lansia adalah aset keluarga yang masih sangat berperan. Dengan pengalaman hidup yang dimiliki, para lansia bisa memberikan contoh dan nasihat kepada anak-cucunya agar lebih peduli terhadap kesehatan anak, termasuk pemenuhan gizi yang baik agar terhindar dari stunting," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi semangat para lansia yang hadir, dan berharap mereka bisa menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing.



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana sosialisasi peningkatan ekonomi keluarga mendukung penurunan angka stunting.

Selain penurunan angka stunting, Mimik juga mengajak

masyarakat mendukung program-program prioritas Pemkab Sidoarjo, seperti renovasi rumah warga tidak mampu, perbaikan jalan berlubang, serta menciptakan generasi Sidoarjo yang sehat dan cerdas.

"Komitmen Subandi-Mimik adalah maju bersama untuk menyejahterakan masyarakat. Ke depan tidak ada lagi jalan berlubang, tidak ada anak yang tidak sekolah," tegasnya.

"Kalau ada tetangga kanan kiri yang tidak sekolah atau rumahnya tidak layak, monggo langsung lapor ke saya. Akan segera kami tindak lanjuti," tambahnya.

Upaya Pemkab Sidoarjo menurunkan angka stunting dilakukan melalui sinergi lintas sektor, melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta kelompok lansia sebagai agen perubahan. ●Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



AHMAD BEZA/JAWA POS

TAK LAGI GUNAKAN PLASTIK: Sunyoto, salah satu pemilik IKM tahu di Desa Tropodo, Krian, meniriskan tahu yang sudah digoreng, Sabtu (14/6). Pihaknya kini sudah menggunakan bahan bakar dari serbuk kayu.

PGN Hitung Biaya Pemasangan Pipa Gas IKM Tahu Tropodo

SIDOARJO - Pemasangan jaringan gas ke sejumlah industri kecil menengah (IKM) tahu di Desa Tropodo, Krian, bisa dilakukan. Kini, Perusahaan Gas Negara (PGN) Sidoarjo PGN masih menghitung biaya pemasangannya.

Perwakilan PGN Area Sidoarjo Nurdiansa menyampaikan, jaringan gas utama sudah tersedia di jalur Sidoarjo-Mojokerto. Tantangannya, tinggal pada proses penyaluran hingga menjangkau perkampungan warga di Tropodo.

"Kami cukup prihatin karena di Desa Tropodo ini ternyata masih banyak yang menggunakan bahan bakar dari limbah plastik," ujarnya kemarin (16/6). PGN sudah beberapa kali survei lapangan untuk



Finalisasi hitungan pemasangan gas, pipa, dan biaya lain masih kami susun. Hasilnya akan kami serahkan ke Sekda Provinsi Jatim maupun Sekda Kabupaten Sidoarjo."



NURDIANSA
Perwakilan PGN Area Sidoarjo

memetakan kebutuhan riil di Tropodo. Saat ini, masih tahap penyusunan perhitungan akhir sebelum diserahkan ke pemerintah. (eza/uzi)

Jawa Pos